



KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH
KALIMANTAN SELATAN

bangga
melayani
bangsa



KEMENKUM KALSEL NEWS

BULETIN

MINGGU KE-

3

JUNI 2025



KAWASAN KEKAYAAN
INTELEKTUAL SUNGAI JINGAH



KUNJUNGAN KERJA RESES
KOMISI XIII DPR RI



SERTIJAB KAKANWIL
KEMENKUM KALSEL

KANWIL KEMENKUM KALIMANTAN SELATAN

- DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM
- DIVISI PELAYANAN HUKUM
- BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM

Terhubung lebih dekat:



kemenkumkalsel



@kemenkumkalsel



kalsel.kemenkum.go.id



Pimpin Apel Pagi, Kakanwil Kemenkum Kalsel Nuryanti Widyastuti Titipkan Capaian WBK dan Jaga Silaturahmi



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan menggelar apel pagi yang berlangsung penuh haru dan refleksi, seiring dengan momen perpisahan Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti, yang memimpin apel terakhirnya sebelum melaksanakan serah terima jabatan.

Apel yang dilaksanakan di halaman kantor pada Senin (16/6/25) pagi tersebut dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka, dengan Nuryanti Widyastuti bertindak sebagai pembina apel.

Dalam amanatnya, Nuryanti menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas kebersamaan yang telah terjalin selama masa kepemimpinannya.

"Hari ini adalah apel terakhir saya sebagai Kepala Kantor Wilayah. Saya ingin menyampaikan terima kasih atas penerimaan, kebersamaan, dan dukungan luar biasa dari seluruh jajaran pegawai maupun PPNPN selama saya bertugas di sini," ucapnya dengan penuh kehangatan.

Ia juga menitipkan harapan besar terhadap capaian Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang tengah diupayakan oleh jajaran Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan.

"Meskipun saya tidak lagi di sini, saya sangat berharap tahun ini Kanwil Kemenkum Kalsel dapat meraih predikat WBK. Saya percaya, dengan kerja sama dan komitmen yang selama ini telah terbangun, kita bisa mencapainya," tegasnya.

Nuryanti juga menyampaikan permohonan maaf atas kekhilafan selama bertugas, baik disengaja maupun tidak, serta mengajak seluruh pegawai untuk tetap menjaga silaturahmi dan semangat kebersamaan.

Sebagai penutup, Nuryanti menyampaikan bahwa serah terima jabatan akan dilaksanakan pada Selasa, 17 Juni 2025 kepada Meidy Firmansyah selaku Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah.

Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan penyerahan penghargaan kepada pegawai terbaik Triwulan II Tahun 2025. Penghargaan diberikan kepada Yansurullah, yang dinilai berprestasi sebagai bagian dari Tim Kerja Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara.

Apel pagi ini menjadi momen penuh makna yang bukan hanya menandai berakhirnya masa kepemimpinan, tetapi juga menjadi pengingat untuk terus melanjutkan semangat reformasi, integritas, dan kebersamaan dalam membangun pelayanan hukum yang lebih baik di Kalimantan Selatan.



Kemenkum Kalsel Ikuti Apel Bersama Kemenko Kumhamimipas Secara Virtual, Menteri Agus Andrianto : Kerja Maksimal di Masa Transisi!



© Copyright | Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan

Banjarmasin, Humas_Info – Senin, 16 Juni 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Apel Bersama Pegawai yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemenko Kumhamkipas) secara daring. Kegiatan ini diikuti pula oleh jajaran dari Kementerian Hukum (Kemenkum), Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham), serta Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemenimipas), dengan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan, Agus Andrianto, bertindak sebagai pembina apel.

Kegiatan apel virtual yang dipusatkan dari Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkum Kalsel ini turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti; Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kalimantan Selatan, Yan Welly Wiguna; Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana; Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah; serta seluruh jajaran Kementerian HAM dan Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, termasuk para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang baru bergabung.

Dalam amanatnya, Menteri Agus Andrianto menyampaikan sejumlah pesan penting sebagai pedoman pelaksanaan tugas di masa transisi kelembagaan yang tengah berlangsung.

Apel pagi ini menjadi momen strategis untuk menyampaikan beberapa hal penting. Kita sedang menjalani masa transisi yang tidak hanya bersifat administratif, tapi juga menyangkut transformasi budaya kerja. Untuk itu, saya mengapresiasi rencana kerja yang telah disiapkan dengan baik dan berharap seluruh target dapat tercapai hingga akhir bulan ini," tegas Agus.



2025 ◆ APEL BERSAMA PEGAWAI KEMENKO KUMHAMMIPAS, KEMENKUM, KEMENHAM, KEMENIMIPAS

"Ia juga menyoroti urgensi peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai inti dari reformasi birokrasi. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan reformasi diukur dari kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan.

"Indeks Reformasi Birokrasi harus menjadi perhatian bersama. Kita dorong peningkatannya karena akan berdampak langsung pada peningkatan tunjangan kinerja. Reformasi birokrasi bukan hanya slogan, tapi harus tampak dalam tindakan nyata," lanjutnya.

Khusus kepada para CPNS, Agus menekankan pentingnya adaptasi cepat serta membangun sikap hormat dan profesionalisme sejak dini.

"SK CPNS sudah diterbitkan. Kini saatnya saudara-saudara belajar dari senior, pahami budaya organisasi, dan mulai dari hal kecil seperti etika dan sikap. Profesionalisme bukan sekadar bekerja, tapi mencerminkan integritas pribadi," pesannya.

Menutup amanat, Menteri menyampaikan optimisme bahwa semangat kolaborasi yang dibangun bersama akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh lini kerja.

Apel bersama ini menjadi momentum konsolidasi awal yang penting dalam menyambut struktur baru kelembagaan hasil integrasi, dengan semangat transformasi, sinergi, dan pelayanan publik yang semakin prima.



Kanwil Kemenkum Kalsel Hadiri Rapat Persiapan Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI Bersama Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan mengikuti Rapat Persiapan Kegiatan Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI, yang diselenggarakan oleh Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama secara daring. Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat BerAKHLAK dan dihadiri oleh jajaran pusat maupun daerah yang menjadi bagian dari pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja tersebut.

Kunjungan Komisi XIII DPR RI dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 19–23 Juni 2025 dengan lokasi kunjungan mencakup tiga provinsi, yakni Lubuklinggau (Sumatera Selatan), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), dan Sorong (Papua Barat Daya).

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama, Ronald Lumbuun, yang menyampaikan penjelasan umum terkait rencana kunjungan, termasuk identifikasi titik kunjungan dan pembagian peran masing-masing unit yang terlibat.

Turut hadir dalam rapat dari jajaran Kalimantan Selatan antara lain Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmasyah, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka dan jajaran.

Dalam pembahasan rapat, ditekankan pentingnya kesiapan substansi yang akan disampaikan kepada anggota Komisi XIII DPR RI, termasuk aspek teknis seperti pengaturan logistik, protokol penyambutan, hingga dokumentasi kegiatan. Pembagian tanggung jawab pun dilakukan secara detail, mengingat pentingnya kelancaran kegiatan yang bersifat strategis ini.

Disampaikan pula bahwa Kanwil Kemenkum Kalsel telah melakukan koordinasi intensif bersama jajaran Kanwil Ditjen Imigrasi Kalsel, Kanwil Ditjen Pemasarakatan Kalsel, dan Kanwil HAM Kalsel dalam menyambut kedatangan rombongan DPR RI pada tanggal 19 Juni 2025.

Rapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan kesepakatan teknis serta langkah tindak lanjut yang akan segera dituntaskan menjelang hari pelaksanaan.

Sinergi Kemenkum Kalsel dan Pemko Banjarmasin: Sungai Jingah Cetak Sejarah Jadi Kawasan KI Pertama di Kalsel



Banjarmasin, Humas_Info - Senin, (16/06/2025), Balai Kota Banjarmasin menjadi saksi penyerahan piagam penetapan Kelurahan Sungai Jingah sebagai Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual (KI) dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin.

Piagam diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah dan jajaran Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, kepada Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hj. Ananda, yang hadir bersama perwakilan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Camat Banjarmasin Utara, serta Lurah Sungai Jingah.

Dalam sambutannya, Kakanwil Nuryanti menyampaikan apresiasi atas capaian Kelurahan Sungai Jingah yang dinilai berhasil membangun potensi lokal berbasis kekayaan intelektual. Ia berharap penghargaan ini dapat menjadi semangat bagi masyarakat dan pemerintah setempat untuk terus mengembangkan karya dan inovasi daerah.

Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hj. Ananda, menyambut baik penghargaan tersebut dan menyampaikan terima kasih atas perhatian serta dukungan dari Kementerian Hukum. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjaga dan meningkatkan capaian tersebut.

Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen bersama dalam membangun ekosistem kekayaan intelektual di Kota Banjarmasin, khususnya di Kelurahan Sungai Jingah.



Kemenkum Kalsel dan Bank Mandiri Perkuat Sinergi melalui Sosialisasi Produk dan Layanan



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan terus mendorong peningkatan sinergitas dengan berbagai mitra strategis. Salah satunya diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi produk dan layanan perbankan bersama Bank Mandiri yang dilaksanakan pada Senin (16/6/25) di Balai Pertemuan Garuda (BPG) Kanwil Kemenkum Kalsel.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka, dan dihadiri oleh jajaran pegawai Kanwil Kemenkum Kalsel. Turut hadir pula Kepala Cabang Bank Mandiri Pangeran Samudera, Delni Sepriyanti, Branch Sales Manager Bank Mandiri Pangeran Samudera, Aan, serta Government Officer Bank Mandiri Pangeran Samudera, Made.



Dalam kesempatan tersebut, Bank Mandiri memaparkan berbagai produk dan layanan unggulan kepada para pegawai, termasuk fasilitas yang dapat diakses secara personal maupun institusional. Kegiatan ini juga menjadi ajang eksplorasi potensi kerja sama strategis antara Kanwil Kemenkum Kalsel dan Bank Mandiri, terutama dalam mendukung kelancaran operasional dan optimalisasi pengelolaan anggaran.

Salah satu poin utama kerja sama yang ditawarkan adalah implementasi Cash Management System (CMS) serta penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), yang dinilai dapat menunjang efisiensi transaksi keuangan di lingkungan Kemenkum Kalsel.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan sinergi antara Kanwil Kemenkum Kalsel dan Bank Mandiri dapat semakin erat, serta mendukung pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan akuntabel.



Kanwil Kemenkum Kalsel Gelar Rapat Harmonisasi Raperda Pertambangan Bersama Pemprov



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) menggelar Rapat Harmonisasi bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pelaksanaan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Senin(16/06/2025).

Rapat dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti. Dalam sambutannya, Anton menegaskan pentingnya harmonisasi sebagai bagian strategis dalam proses pembentukan peraturan daerah, guna memastikan substansi regulasi selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta menjamin kualitas produk hukum yang dihasilkan.

Rapat dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Kalsel, Bahjahtul Mardiah, dan diikuti oleh para Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Perancang Peraturan Perundang-undangan serta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kanwil.

Dari pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, hadir antara lain:

- * Bambang, Kasubag Penyusun Produk Hukum dan Perundang-undangan,
- * Endarto, Kabid Perizinan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM),
- * Said, Kabag Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Kalsel.

Raperda yang dibahas ini merupakan bentuk implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam aturan tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan pendelegasian pemberian sertifikat standar, izin, serta melakukan pembinaan dan pengawasan di sektor pertambangan.

“Pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah harus kita jalankan dan aplikasikan secara menyeluruh, baik dari sisi perizinan, pembinaan, pengawasan, dan aspek lainnya,” tegas Endarto dalam rapat tersebut. Melalui harmonisasi ini, diharapkan peraturan yang akan ditetapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat dan aplikatif dalam mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pertambangan mineral dan batubara di daerah, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.



Rapat MPW Kemenkum Kalsel Tuntaskan Isu Pindah Wilayah dan Konduite Notaris



Banjarmasi, Humas_Info – Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah, Ibu Nuryanti Widyastuti, bersama Ketua MPW, Meidy Firmansyah. Rapat ini membahas beberapa agenda penting terkait konduite notaris serta permohonan perpanjangan masa jabatan.

Agenda pertama rapat adalah pengenalan tim baru MPW, sebagai langkah awal memperkenalkan formasi pengurus baru kepada seluruh anggota.

Agenda kedua membahas konduite atas permohonan pindah notaris atas nama Arsep Dolivan dari Kota Banjarmasin ke Kota Bekasi. Ketua MPW, Meidy Firmansyah, memberikan arahan agar dilakukan pengecekan lebih lanjut terkait kemungkinan adanya tunggakan perkara sebelum permohonan dapat disetujui. Prinsipnya, apabila telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan pindah dapat diproses.

Agenda ketiga membahas permohonan perpanjangan masa jabatan notaris Ni Luh Permen. Kepala Kanwil, Ibu Nuryanti, menyampaikan dukungannya terhadap semangat Ibu Ni Luh yang masih ingin bekerja di usia yang tidak muda lagi. “Kalau masih bisa bekerja, kenapa harus di rumah,” ujarnya. Sepanjang persyaratan hukum dipenuhi, permohonan perpanjangan masa jabatan dapat dikabulkan. Dalam rapat juga dibahas mengenai koordinasi antara MPD dan MPW terkait hak dan kewajiban notaris, termasuk mengenai cuti serta pemenuhan aspek konduite.

Kemenkum Kalsel Lakukan Analisis dan Evaluasi Perda Perlindungan Lahan Pertanian, Upaya Menjaga Kedaulatan Pangan



Banjarmasin — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan bersama Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi Peraturan Daerah dengan tema “Pengelolaan Lahan”. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui evaluasi terhadap lima Peraturan Daerah (Perda) di Provinsi Kalimantan Selatan.

Langkah ini dinilai strategis untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi sektor pertanian, seperti alih fungsi lahan yang tidak terkendali, perubahan iklim ekstrem, dan tekanan pembangunan yang terus meningkat.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan, Anton Edward Wardhana, yang hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti, menyampaikan bahwa sebagai negara agraris, ketergantungan Indonesia terhadap sektor pertanian sangat tinggi—baik dalam pemenuhan kebutuhan pangan maupun penyediaan lapangan kerja.

“Namun, ketersediaan lahan pertanian terus menyusut akibat pertambahan penduduk, alih fungsi lahan, dan belum efektifnya regulasi yang ada. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap lahan pertanian menjadi hal yang mendesak untuk diperkuat melalui evaluasi regulasi yang berlaku,” ujar Anton.

Adapun lima Perda yang menjadi objek analisis dan evaluasi meliputi:

1. Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2014
2. Perda Kabupaten Balangan Nomor 20 Tahun 2014
3. Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2019
4. Perda Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2019
5. Perda Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2023



Anton menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan berdasarkan enam dimensi utama, yakni: kesesuaian dengan Pancasila, ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, harmonisasi pengaturan, kejelasan rumusan norma, kesesuaian asas bidang hukum, serta efektivitas pelaksanaan. “Tujuan utama evaluasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas regulasi dan memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah agar Perda yang ada tetap relevan dan implementatif sesuai perkembangan zaman,” tambahnya.

Perda tersebut juga merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang mengatur perlindungan lahan demi menjamin ketersediaan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, memberikan kepastian usaha, serta menjaga keseimbangan ekologis.

Evaluasi Perda ini dilaksanakan melalui empat tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut. Hasil evaluasi nantinya akan disampaikan kepada pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan sebagai masukan dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan ke depan.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Guntur Ferry Fahtar, yang hadir bersama Kabag Peraturan Perundang-undangan dan jajarannya, menyampaikan harapannya agar kegiatan ini mampu memperkuat kemandirian dan ketahanan pangan nasional, sekaligus mencegah pemborosan investasi infrastruktur pertanian akibat alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan Gelar Rapat Harmonisasi Raperda RPJMD Bersama Pemkab Barito Kuala



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (KemenkumKalsel) menggelar Rapat Harmonisasi bersama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Kegiatan ini membahas tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 di Kabupaten Barito Kuala, Senin (16/06/2025).

Rapat dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, yang hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti. Dalam sambutannya, Anton menekankan bahwa harmonisasi merupakan elemen kunci dalam pembentukan peraturan daerah. Ia menyampaikan bahwa keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sangat penting untuk menjamin kualitas dan legitimasi produk hukum daerah.

Rapat dipimpin oleh Bahjahtul Mardiah, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, serta diikuti oleh para Pejabat Fungsional Tertentu (JFT) Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan kantor wilayah. Dari pihak Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, hadir antara lain Munadi selaku Kepala Bappelitbang Kab. Barito Kuala, Mety Monita selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Barito Kuala.

Raperda ini disusun sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus ditetapkan melalui Peraturan daerah sebagai dasar perencanaan pembangunan lima tahunan berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih. Dalam kesempatan tersebut, Munadi selaku Kepala Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala menyampaikan bahwa dokumen perencanaan ini harus menjadi acuan bersama dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan daerah secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai visi dan misi kepala daerah.





Dampingi Presiden Dalam Kunjungan Kenegaraan, Menkum: Hargai Komitmen Singapura Terkait Perjanjian Ekstradisi



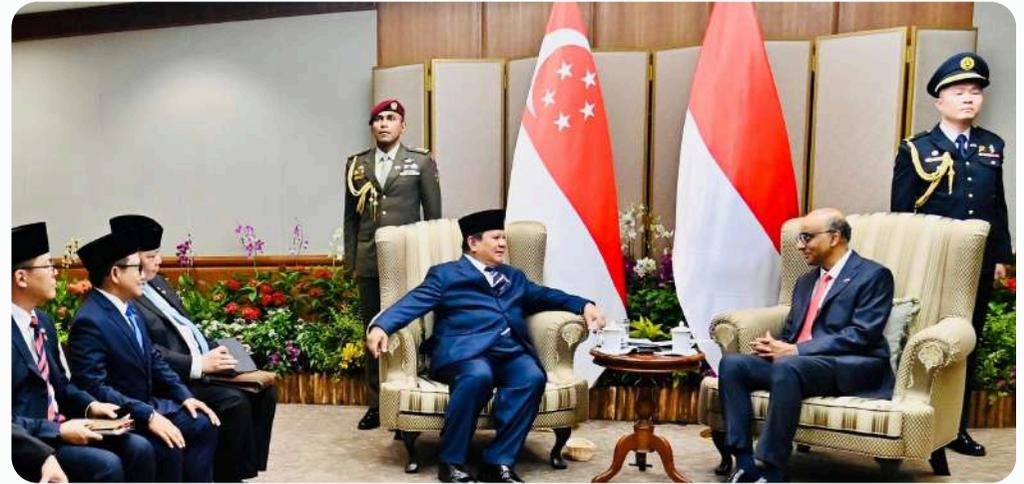
Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menyambut baik komitmen Pemerintah Singapura dalam perjanjian ekstradisi/mutual legal assistance (MLA) antara kedua negara. Menteri Hukum melihat ini sebagai langkah maju hubungan diplomatik yang sama sama menguntungkan dalam menjunjung tinggi supremasi hukum di antara kedua negara.

“Salah satu poin yang disampaikan tadi dalam pertemuan Perdana Menteri Singapura dan Bapak Presiden adalah perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura. Pemerintah Singapura berkomitmen untuk melaksanakan perjanjian yang telah ditandatangani” ujar Supratman saat ditanya wartawan.

Selanjutnya, Menteri Hukum optimis, komitmen Pemerintah Singapura dalam perjanjian ekstradisi/MLA ini menjadi momentum baik bagi kedua negara saling berkoordinasi dan bekerjasama lintas negara dalam penegakan hukum.

Menteri Hukum menghadiri dan mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan bilateral tingkat tinggi Leader’s Retreat bersama Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Parliament House, Singapura, Senin (16/6).

Dalam kunjungan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, ada beberapa MoU yang ditandatangani diantaranya, terkait Pengembangan energi ramah lingkungan mencakup, perdagangan listrik yang bersih, penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) lintas batas, dan pembangunan kawasan industri hijau di Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu ditandatangani juga nota kesepahaman di bidang keamanan pangan dan teknologi pertanian, termasuk program pengembangan petani muda dan pertukaran praktik terbaik.



“Terkait dengan semua MoU ini, Kementerian Hukum sudah pasti akan memberikan supporting, baik terkait Danantara, ESDM, Perumahan dan juga Pangan” ujarnya.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, menyambut baik komitmen Pemerintah Singapura dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi yang disampaikan dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Singapura.

“Langkah ini sangat positif dalam memperkuat kerja sama penegakan hukum lintas negara. Ini juga menunjukkan keseriusan kedua negara dalam memberantas kejahatan lintas batas,” ujar Nuryanti. Ia menambahkan, jajaran Kemenkum di daerah siap mendukung kebijakan pusat, termasuk dalam koordinasi antar instansi guna memastikan implementasi perjanjian berjalan efektif.



ASN Kemenkum Harus Jadi Simbol dan Agen Pemersatu Bangsa



Jakarta - Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Hukum (Kemenkum) bukan hanya pelaksana teknis kebijakan publik, tapi juga harus menjadi simbol dan agen pemersatu bangsa. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej saat membuka kegiatan Pelatihan Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB).

Menurut Wamenkum, kemampuan ASN untuk bersikap adil, inklusif, dan peka terhadap keberagaman menjadi sangat penting. Oleh karena itu, Pelatihan LKLB yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam mengembangkan kompetensi sosio-kultural.

“Pelatihan LKLB merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam mengembangkan kompetensi sosio-kultural, dilaksanakan untuk mendukung Asta Cita kesatu yaitu memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM),” ujarnya saat memberikan sambutan secara daring di ruang kerjanya, Jakarta, Senin (16/06/2025). Lebih lanjut Wamenkum mengatakan, BPSDM Hukum yang berperan sebagai pusat pembelajaran, tidak hanya fokus pada peningkatan kompetensi teknis aparatur, tetapi juga penanaman nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan dalam setiap proses pembelajaran.

Selain itu, Wamenkum menyampaikan bahwa seluruh pimpinan dan pendidik dalam birokrasi juga memiliki tanggung jawab moral yang strategis dalam membentuk karakter ASN yang inklusif, berintegritas, dan adaptif terhadap keberagaman. “Literasi keagamaan lintas budaya bukan sekadar pengetahuan konseptual, melainkan kompetensi kepemimpinan yang sangat relevan dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berkeadaban,” kata pria yang akrab disapa Eddy.

Lebih lanjut, Wamenkum mengatakan seorang ASN tidak cukup hanya cakap dalam manajemen dan regulasi, tetapi juga harus mampu membangun komunikasi lintas identitas, menciptakan ruang yang aman dan setara bagi semua. “ASN Kemenkum juga harus menjadi teladan dalam menegakkan nilai-nilai toleransi, keadilan, dan kemanusiaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Eddy.

Wamenkum berharap pelatihan ini dapat menjadi momentum bagi seluruh peserta pelatihan untuk menjadi pionir dalam menyebarkan nilai toleransi dan keberagaman di setiap satuan kerja masing-masing dan ditengah masyarakat. “Saya percaya, kompetensi ini akan memperkuat peran ASN sebagai perekat persatuan, pelindung hak-hak warga negara, dan pendorong terciptanya kebijakan bidang hukum yang lebih adil dan humanis,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala BPSDM, Gusti Ayu Putu Suwardani dalam laporannya juga mengatakan bahwa salah satu tujuan pelatihan ini untuk meningkatkan kemampuan ASN dalam berinteraksi dengan masyarakat majemuk. “Tujuannya yaitu termasuk memahami, menerima, mempromosikan keberagaman dan menguatkan eksistensi dan kolaborasi damai antaragama di Indonesia dengan mengenalkan literasi keagamaan lintas budaya bagi ASN,” ujar Ka BPSDM.

Pelaksanaan kegiatan Pelatihan LKLB bekerja sama dengan Institut Leimena dan terbagi menjadi dua angkatan. Angkatan I dilaksanakan pada 16 - 19 Juni 2025 yang diikuti oleh 198 orang dengan peserta pelatihan yaitu Kepala Balai Diklat Hukum, Widyaiswara Kemenkum, Dosen dan Pembina Politeknik Pengayoman Indonesia serta Jabatan Fungsional lainnya. Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, menyampaikan dukungannya atas pesan Wakil Menteri Hukum terkait pentingnya peran ASN sebagai simbol dan agen pemersatu bangsa.

“Pesan Wamenkum sangat relevan. ASN Kemenkum memang harus mampu menjadi teladan dalam menjaga toleransi dan keberagaman, baik di lingkungan kerja maupun dalam pelayanan publik,” ujar Nuryanti di Banjarmasin, Selasa (17/6).

Menurutnya, pelatihan Literasi Keagamaan Lintas Budaya merupakan langkah nyata dalam membentuk karakter ASN yang inklusif dan berwawasan kebangsaan. “Kami di wilayah siap menindaklanjuti semangat ini agar tercermin dalam sikap dan pelayanan seluruh jajaran,” tegasnya.

Nuryanti Widyastuti Pamit dari Kemenkum Kalsel, Estafet Kepemimpinan Diteruskan Meidy Firmansyah



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut Kepala Kantor Wilayah pada Selasa, 17 Juni 2025, bertempat di Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkum Kalsel.

Acara ini menandai serah terima jabatan dari Kepala Kantor Wilayah sebelumnya, Nuryanti Widyastuti, kepada Meidy Firmansyah yang kini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah.

Turut hadir dalam kegiatan ini sejumlah pejabat dan mitra kerja, di antaranya Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kalimantan Selatan, Yan Welly Wiguna, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardana, Kepala Bidang Perawatan, Pengamanan, dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjenpas Kalsel, Isnawan, Perwakilan Bank BRI Cabang Banjarmasin, Perwakilan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kalimantan Selatan, serta seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan.

Momen utama ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan Memori Jabatan, serta pemutaran video kilas balik perjalanan kepemimpinan Kakanwil sebelumnya. Persembahan dari para CPNS juga turut memeriahkan suasana sebelum penyampaian sambutan dari kedua pejabat.

Dalam sambutannya, Nuryanti Widyastuti menyampaikan bahwa hari ini menjadi momen bersejarah karena merupakan hari serah terima jabatan kepada penggantinya. Ia menyebutkan perjalanannya menjabat Kepala Kantor Wilayah sejak perubahan nomenklatur dari Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian Hukum. Ia juga menitipkan pesan agar seluruh jajaran terus berjuang meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan mengawal proses pembangunan gedung baru di Banjarbaru.

“Terima kasih atas penerimaan dan rasa kekeluargaan yang luar biasa dari seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Kalsel. Mohon maaf jika ada kekurangan selama saya menjabat. Semoga silaturahmi tetap terjaga,” ujar Nuryanti.

Sementara itu, Plt. Kakanwil, Meidy Firmansyah, menyampaikan apresiasi dan penghormatan setinggi-tingginya kepada Nuryanti Widyastuti atas dedikasi, integritas, dan kepemimpinannya yang menginspirasi.

“Bu Nuryanti adalah sosok pemimpin yang lengkap – tegas, detail, berintegritas, sekaligus menjadi sosok ibu bagi kita semua. Amanah yang beliau tinggalkan, khususnya cita-cita meraih WBK, akan terus kita perjuangkan bersama,” tuturnya.

Acara ditutup dengan momen pelepasan secara simbolis, berupa penyerahan buket bunga serta iring-iringan mengantar Nuryanti Widyastuti yang akan melanjutkan pengabdian sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan di Jakarta. Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh haru dan kekeluargaan, menjadi penanda transisi kepemimpinan yang harmonis di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan.

Menkum: Pengadilan Singapura Tolak Pengajuan Penangguhan Penahanan PT



Proses ekstradisi atas nama PT dari Singapura ke Indonesia mulai mendapatkan titik terang, setelah Attorney - General's Chambers (AGC) Singapura selaku otoritas pusat singapura menyampaikan informasi pada Senin 16 Juni, bahwa pengadilan telah memutuskan untuk menolak pengajuan penangguhan penahanan dengan jaminan (bail) yang diajukan PT dan memerintahkan PT untuk tetap ditahan.

“Informasi yang kami dapatkan langsung dari otoritas resmi Singapura yaitu AGC mudah mudahan mempercepat proses pengadilan dan kita bisa segera melakukan ekstradisi atas nama PT” jelas Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Menteri Hukum juga menggarisbawahi bahwa keputusan ini adalah cerminan bentuk komitmen dari Pemerintah Singapura atas pelaksanaan Perjanjian Ekstradisi yang sudah disepakati bersama. “Kita patut bersyukur ini adalah langkah awal dari hubungan kedua negara terutama dalam penegakan hukum, saya mengajak semua pihak untuk saling mendukung, dan tentu kita tidak bisa mengintervensi proses hukum di Singapura” ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia secara resmi pada 22 Februari 2025 melakukan permintaan ekstradisi atas nama PT. Permintaan tersebut sebagai tindak lanjut atas permintaan sementara/provisional arrest (PA) yang sebelumnya disampaikan Kepolisian RI pada 18 Desember 2018. Selanjutnya pada 17 Januari 2025, PT telah ditangkap oleh Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) yang memiliki kompetensi dan otoritas dalam penanganan tindak pidana korupsi di Singapura.

Hal ini direspon PT dengan mengajukan permohonan penangguhan penahanan dan kemudian ditolak Pemerintah Singapura. Sebagai tindak lanjut, pada 18 Maret 2025, Minister For Law Singapura mengeluarkan notifikasi kepada Magistrate (pengadilan tinggi di Singapura) sebagai respon permohonan estradisi dari Pemerintah Indonesia. “Kami mendapat informasi bahwa pelaksanaan committal hearing terhadap ekstradisi PT pada 23-25 Juni 2025” jelasnya.

Untuk diketahui bahwa ekstradisi PT ini adalah kasus pertama setelah pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian ekstradisi bersama Pemerintah Singapura.

Secara terpisah Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Meidy Firmansyah, menyambut baik keputusan Pengadilan Singapura yang menolak permohonan penangguhan penahanan atas nama PT, dan menilainya sebagai bukti nyata komitmen bersama Indonesia-Singapura dalam menegakkan hukum lintas negara. “Langkah ini memperkuat implementasi perjanjian ekstradisi yang telah disepakati dan menjadi preseden penting bagi kerja sama hukum kedua negara,” pungkasnya.

Meidy juga menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah pusat dalam mempercepat proses ekstradisi, sekaligus berharap committal hearing yang akan digelar dapat segera membuka jalan bagi pemulangan PT ke Indonesia.

Perkuat Akuntabilitas, Kanwil Kemenkum Kalsel Bahas Hasil Reviu LKjIP 2024



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum melalui Bagian Pengelolaan Kinerja. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah dan diikuti oleh Tim Kerja Pengelolaan Perencanaan Anggaran dan Laporan serta perwakilan dari bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), Badan Strategi Kebijakan (BSK), dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) secara virtual pada Selasa (17/06).

Reviu terhadap LKjIP merupakan bagian krusial dalam siklus manajemen kinerja organisasi sektor publik. Dokumen ini menjadi wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, seperti Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Kegiatan ini bertujuan untuk menilai kualitas dan konsistensi laporan kinerja, serta memastikan adanya keterkaitan logis antara aspek perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Dalam kesempatan tersebut, evaluator dari Biro Perencanaan dan Organisasi memaparkan hasil reviu atas dokumen LKjIP yang disusun oleh Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan.

Secara umum, laporan kinerja dinilai telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun demikian, terdapat sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian, antara lain masih adanya kekurangan pada aspek analisis di setiap Indikator Kinerja Kegiatan, serta satu indikator yang belum tercapai pada tahun 2024. Selain itu, juga disampaikan beberapa saran untuk penyempurnaan laporan ke depan.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan dari Kantor Wilayah menyampaikan bahwa pihaknya akan segera melakukan penyempurnaan terhadap analisis pada setiap indikator, sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu dengan menyertakan tujuh jenis analisis. Terkait indikator yang belum tercapai pada bidang AHU, dijelaskan bahwa target tersebut tidak sepenuhnya berada dalam kendali Kantor Wilayah, karena proses perhitungan dan pencapaian target PNBPN dilakukan secara terpusat oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Meskipun demikian, capaian PNBPN AHU secara keseluruhan pada tahun 2024 tercatat sebesar 7,74%, melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 6%. Capaian ini mencerminkan bahwa secara umum kinerja pelayanan AHU tetap berjalan optimal. Kanwil Kalsel juga mengusulkan adanya klarifikasi ulang terkait penetapan target indikator PNBPN AHU di tingkat wilayah, guna menghindari potensi ketidaksesuaian data atau anomali dalam laporan kinerja. Melalui reviu ini, diharapkan proses penyusunan LKjIP ke depan dapat semakin ditingkatkan, baik dari sisi kualitas substansi maupun akuntabilitasnya, guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi hasil.

Tahap Akhir Pendaftaran IG Kayu Manis Loksado Resmi Dimulai, Wabup HSS Terima Tim Ahli IG dan Kanwil Kemenkum Kalsel



Hulu Sungai Selatan, KI_Info – Proses pendaftaran Indikasi Geografis (IG) Kayu Manis Loksado memasuki tahap akhir. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) bersama Tim Ahli IG Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melakukan kunjungan resmi ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) untuk melaksanakan pemeriksaan substantif pada Selasa (17/6) di Kantor Wakil Bupati HSS.

Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Wakil Bupati HSS, H. Suriani, didampingi Kepala Bappelitbangda, M. Arliyan Syahril dan Kepala Dinas Pertanian, Muhammad Noor, adapun tim yang hadir dari Kementerian Hukum terdiri dari Tim Ahli IG DJKI, Kepala Bidang Pelayanan KI Kanwil Kemenkum Kalsel, Riswandi dan Tim Kerja Fasilitasi Layanan KI.

Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa kegiatan pemeriksaan substantif akan dilaksanakan selama tiga hari, yakni pada 17 hingga 19 Juni 2025. Lokasi pemeriksaan difokuskan pada dua desa, yaitu Desa Haratai dan Desa Loksado, yang merupakan sentra utama penghasil kayu manis khas daerah pegunungan Meratus tersebut. Pemeriksaan substantif ini turut didampingi oleh jajaran dari Kanwil Kemenkum Kalsel, Bappelitbangda HSS, dan Dinas Pertanian HSS sebagai bentuk sinergi dalam proses penguatan perlindungan hukum terhadap kekayaan komunal daerah.

Tahapan pemeriksaan substantif ini menjadi langkah penentu sekaligus bagian akhir dari keseluruhan proses pendaftaran IG Kayu Manis Loksado. Jika seluruh persyaratan dinyatakan terpenuhi, maka produk unggulan ini akan resmi terdaftar sebagai Indikasi Geografis pertama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Wakil Bupati H. Suriani dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas pendampingan yang diberikan oleh Kementerian Hukum melalui DJKI dan Kanwil Kemenkum Kalsel. Ia berharap pengakuan IG ini dapat menjadi tonggak penting dalam peningkatan nilai ekonomi daerah, pelestarian lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat lokal, khususnya para petani kayu manis di kawasan Loksado.



Wamenkum Sebut Transformasi Digital di Bidang Hukum Kian Mendesak



Jakarta - Transformasi digital dalam penegakan hukum serta pemberian akses terhadap layanan hukum sangat mendesak untuk segera dilakukan. Pasalnya, sektor hukum memainkan peran yang fundamental dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej, mengatakan indikator keberhasilan transformasi digital dalam birokrasi hukum tidak hanya diukur dari implementasi teknologi semata, tetapi dari sejauh mana kebijakan yang disusun mampu menghadirkan perubahan nyata dalam tata kelola layanan publik.

“Terdapat enam indikator yang merupakan fondasi utama dalam mengukur kesuksesan transformasi digital menuju birokrasi yang adaptif, responsif, dan berdaya saing tinggi,” ujar Wamenkum di Graha Pengayoman, Selasa (17/06/2025). Indikator pertama adalah integrasi, yaitu terciptanya koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan sistem elektronik yang memungkinkan pertukaran data, informasi, dan layanan secara terpadu.

Yang kedua adalah andal, yaitu membuat layanan digital yang tangguh, stabil, dan minim gangguan, sehingga membangun kepercayaan pengguna terhadap sistem. Indikator selanjutnya adalah akuntabel dan efisien yang mendukung terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Akuntabel, di mana setiap kebijakan mendukung transparansi, kejelasan fungsi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan layanan publik. Keempat yakni efisien, yakni optimalisasi pemanfaatan sumber daya—baik manusia, waktu, maupun anggaran—yang mendukung pelaksanaan SPBE secara efektif dan tepat guna,” lanjut Wamenkum saat Upacara Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIV Metode Blended Learning Terbatas Kementerian Hukum (Kemenkum) Tahun Anggaran 2025.

Poin selanjutnya adalah arus yang mudah diakses, yaitu memastikan seluruh layanan dapat diakses secara mudah dan inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Kemudian, indikator yang terakhir berkaitan dengan kepuasan publik, sebagai hasil akhir dari seluruh proses, di mana kebijakan mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas layanan yang diberikan.

Pembahasan transformasi digital di bidang hukum dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sejatinya merupakan tema dalam kegiatan PKN. Pria yang sering disapa Eddy ini berharap ke-60 orang peserta dapat mengikuti PKN dengan baik. “Semoga PKN dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin visioner dan transformasional yang mampu menggerakkan perubahan, pemimpin yang mampu merumuskan kebijakan, mengeksekusi program dengan inovatif, serta menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat, mempercepat perubahan birokrasi kita menuju Indonesia yang lebih modern, inklusif, dan berkeadilan,” tutupnya.



Sementara itu, Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara (LAN), Andi Taufik, mengatakan bahwa saat ini Indonesia memasuki era teknologi digital, yang secara fundamental telah mengubah seluruh tatanan kehidupan masyarakat. Menurutnya, era ini membawa perubahan yang pesat dalam bidang digital, khususnya teknologi komunikasi dan globalisasi.

“Kemajuan ini mengubah masyarakat, membentuk cara hidup, cara kerja dan cara berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Karena itu kita hidup di mana aspek data menjadi sangat penting, dan keterhubungan antara satu dengan yang lainnya begitu penting untuk kita kembangkan,” ucap Andi.

“Di mana kita melihat selama ini bidang-bidang hukum identik dengan proses manual dan birokratis. Tapi kini kita semua menghadapi momentum transformasi digital yang sudah tidak dapat kita hindari,” lanjutnya.

Sebelumnya Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, mengatakan salah satu tujuan pelatihan ini adalah untuk mengembangkan kompetensi kepemimpinan strategis pada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dengan lebih efektif dan efisien.

“Kemudian, juga untuk mempersiapkan peserta dalam menghadapi tantangan dan perubahan di masa depan, serta meningkatkan kemampuan memimpin dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi,” ucapnya.

Kegiatan PKN dilaksanakan mulai 17 Juni 2025 hingga 17 Oktober 2025 dalam 913 jam pelajaran atau setara 107 hari, dengan sistem pembelajaran blended learning terbatas. Peserta kegiatan ini berasal dari lintas kementerian yaitu Kemenkum (38 orang), Kementerian Imigrasi dan Pemasaryakatan (11 orang), Kementerian Hak Asasi Manusia (6 orang), Kepolisian Negara Republik Indonesia (4 orang), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebanyak 1 orang.

Secara terpisah Meidy Firmansyah selaku Plt. Kakanwil Kemenkum Kalsel mendukung penuh transformasi digital di bidang hukum yang merupakan langkah strategis yang harus segera diwujudkan.

“Enam indikator yang disampaikan Wamenkum menjadi panduan penting bagi kami di daerah dalam membangun layanan hukum yang terintegrasi, andal, dan mudah diakses masyarakat. Kami terus berbenah agar layanan publik berbasis digital benar-benar dirasakan manfaatnya. Selain itu, Pelatihan Kepemimpinan Nasional adalah momen tepat untuk melahirkan pemimpin yang siap menghadapi tantangan digitalisasi birokrasi,” ucapnya.



Lestarkan Budaya, Dorong Ekraf, Kanwil Kemenkum Kalsel Serahkan Surat Pencatatan Ciptaan Festival Event Bamboo Rafting Tahun 2025



Kandangan, KI_Info — Dalam upaya mendukung promosi pariwisata daerah sekaligus memperkuat perlindungan kekayaan intelektual berbasis budaya lokal, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual turut berpartisipasi dalam pembukaan Festival Bamboo Rafting Hulu Sungai Selatan 2025. Kegiatan berlangsung meriah pada Selasa malam (17/06/2025) bertempat di Lapangan Lambung Mangkurat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Festival yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini dibuka secara resmi dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pelaku seni dan budaya, serta instansi vertikal termasuk Kanwil Kemenkum Kalsel. Dalam kesempatan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel menyerahkan secara simbolis Surat Pencatatan Ciptaan kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk dua karya budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat setempat, yaitu Festival Bamboo Rafting dan Festival Mahumbal.

Penyerahan tersebut dilakukan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi didampingi oleh Tim Ahli Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum, Tim Kerja Fasilitasi Layanan KI, serta Help Desk KI. Hal ini menunjukkan komitmen nyata Kanwil Kemenkum Kalsel dalam mendorong perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional dan karya cipta berbasis kearifan lokal.

Festival Bamboo Rafting sendiri merupakan kegiatan tahunan yang menampilkan olahraga tradisional mengarungi sungai dengan menggunakan rakit bambu, sementara Festival Mahumbal merupakan rangkaian atraksi budaya yang mengangkat tradisi masyarakat Hulu Sungai Selatan. Kedua festival tersebut bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga simbol kekayaan warisan budaya dan identitas daerah yang patut dilestarikan.

Pelaksanaan festival tahun ini berlangsung mulai tanggal 17 hingga 21 Juni 2025, dengan lokasi kegiatan tersebar di Kota Kandangan dan kawasan wisata alam Loksado. Berbagai agenda turut memeriahkan festival, mulai dari parade budaya, pentas seni, lomba bamboo rafting, hingga pameran produk ekonomi kreatif lokal.

Melalui pencatatan ciptaan ini, pemerintah daerah diharapkan semakin menyadari pentingnya perlindungan hukum atas karya dan tradisi budaya yang dimiliki. Kekayaan intelektual tidak hanya sebagai instrumen perlindungan hukum, tetapi juga dapat menjadi aset ekonomi yang memberikan nilai tambah dan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, seniman, dan penggiat pariwisata.

Kanwil Kemenkum Kalsel terus mendorong sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kekayaan intelektual sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing.



Jelang Kunjungan Komisi XIII DPR RI, Kepala Biro Hukerma Tinjau Kesiapan Kemenkum Kalsel



Banjarbaru, Humas_Info – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan, Meidy Firmansyah, menerima kunjungan kerja Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama, Ronald Lumbuun, Selasa (18/6/25). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka koordinasi persiapan kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI yang dijadwalkan berlangsung pada 19 Juni 2025 di Kalimantan Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, Meidy Firmansyah didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka.

Pertemuan berlangsung di ruang kerja Kepala Kantor Wilayah dan membahas berbagai aspek teknis dan substansi yang akan dipresentasikan kepada para anggota Komisi XIII DPR RI. Mulai dari kesiapan materi paparan, penataan logistik, pengaturan protokol penyambutan, hingga dokumentasi kegiatan dibahas secara mendalam.

Ronald Lumbuun menegaskan bahwa kunjungan Komisi XIII DPR RI merupakan momentum strategis yang harus dipersiapkan secara matang. “Kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan kunjungan nanti berjalan dengan baik dan substansi yang disampaikan mencerminkan kondisi riil pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkum di Kalimantan Selatan,” ujarnya.



Plt. Kakanwil, Meidy Firmansyah, menyambut baik kunjungan dan arahan yang disampaikan. Ia juga menegaskan komitmen Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan untuk memberikan dukungan penuh dalam menyelesaikan kegiatan tersebut.

“Kami akan memastikan seluruh aspek teknis dan substansi yang dibutuhkan dapat disiapkan seoptimal mungkin, sebagai bentuk tanggung jawab kami dalam mendukung agenda nasional,” pungkas Meidy.

Kegiatan koordinasi ini diharapkan menjadi landasan penting untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan kunjungan Komisi XIII DPR RI di Kalimantan Selatan.



Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan Ikuti Pembinaan Penerapan dan Penilaian PIPK Tahun 2025 Secara Virtual



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Pembinaan Penerapan dan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025. Kegiatan ini diselenggarakan secara virtual dan diikuti oleh Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kanwil Kemenkum Kalsel pada Rabu, (18/06).

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Sri Yusfina Yusuf. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa penerapan dan penilaian PIPK merupakan bagian integral dari sistem pengendalian intern pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan keandalan penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kementerian Hukum sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan terus berupaya melakukan pembenahan dan penguatan di berbagai lini, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara. Penerapan PIPK secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan kementerian secara menyeluruh.

Dengan keikutsertaan dalam pembinaan ini, jajaran Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan menunjukkan komitmen dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, sekaligus menjadi bagian penting dari upaya kolektif menuju laporan keuangan kementerian yang andal dan berkualitas.

Dari Hutan Loksado Menuju Pengakuan Nasional: Proses IG Kayu Manis Dimulai



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, bersama Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), melaksanakan kegiatan pendampingan pemeriksaan substantif terhadap permohonan Indikasi Geografis (IG) “Kayu Manis Loksado”. Rabu (18/6), di Desa Loksado dan Desa Lok Lahung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kegiatan ini merupakan salah satu tahapan krusial dalam proses pendaftaran IG, yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian data teknis, keunikan produk, serta keterkaitan geografis dan budaya produk dengan wilayah asalnya.

Tim pelaksana terdiri dari Tim Ahli IG DJKI, Kepala Bidang Pelayanan KI, Tim Kerja Fasilitasi Layanan KI, serta Help Desk KI. Turut hadir sebagai peserta kegiatan: Muhammad Noor (Kepala Dinas Pertanian Kab. HSS), Herianto (Penelaah Teknis Kebijakan), M. Afif Bizri (Perwakilan Bappelitbangda Kab. HSS), serta perwakilan dari Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kayu Manis Loksado.

Pemeriksaan substantif dilakukan secara langsung di lapangan, dimulai dari lahan pembibitan, kemudian dilanjutkan ke lahan pohon kayu manis, area pengikisan, dan gudang penjemuran. Tim Ahli IG melakukan observasi dan wawancara untuk mencocokkan antara dokumen deskripsi yang diajukan dengan kondisi serta praktik di lapangan.

MPIG Kayu Manis Loksado memaparkan proses lengkap dari penanaman hingga pengiriman produk. Kegiatan ini juga mencakup diskusi mengenai kesepakatan final terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang akan dimasukkan ke dalam dokumen deskripsi IG.

Sebagai tindak lanjut, Tim Ahli DJKI akan menggelar rapat internal untuk mengevaluasi hasil pemeriksaan substantif sebelum proses berlanjut ke tahap berikutnya. Upaya ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mendorong perlindungan hukum terhadap produk lokal unggulan dan meningkatkan nilai ekonomi bagi masyarakat Hulu Sungai Selatan.

Kuatkan Karakteristik Lokal, Kayu Manis Loksado Siap Ditetapkan sebagai Produk Indikasi Geografis



Kandangan, KI_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual bersama Tim Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, menggelar rapat evaluasi lanjutan terkait dokumen deskripsi Indikasi Geografis (IG) “Kayu Manis Loksado” di Desa Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Rabu, (18/06/2025).

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan substantif sebelumnya yang telah dilakukan di Desa Loksado dan Desa Lok Lahung. Kegiatan ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil temuan lapangan serta menyempurnakan substansi dokumen deskripsi teknis agar sesuai dengan standar penetapan IG.

Tim Ahli IG DJKI memimpin jalannya rapat bersama jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan dan perwakilan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kayu Manis Loksado. Hadir pula dalam kegiatan ini Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Muhammad Noor, Penelaah Teknis Kebijakan, Herianto, Kabid Litbang Bappelitbangda, M. Afif Bizri, serta jajaran terkait lainnya.

Dalam rapat, Tim Ahli memaparkan catatan evaluasi hasil pemeriksaan lapangan serta memberikan masukan teknis terhadap aspek-aspek penting yang perlu disempurnakan, di antaranya karakteristik khas produk, proses produksi, hingga keterkaitan geografis dan nilai budaya lokal. MPIG Kayu Manis Loksado menerima seluruh masukan dan menyatakan komitmen untuk segera melakukan perbaikan terhadap dokumen deskripsi.

Sebagai langkah konkret, disepakati pula batas waktu penyampaian dokumen deskripsi yang telah diperbaiki kepada DJKI, sebagai tahapan krusial sebelum menuju proses penetapan resmi sebagai produk Indikasi Geografis.

Melalui kegiatan ini, diharapkan proses pengakuan hukum terhadap Kayu Manis Loksado sebagai produk khas daerah yang memiliki keunikan dan kualitas unggul dapat segera terwujud, sekaligus memberikan perlindungan hukum dan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat lokal.

Komisi XIII DPR RI Lakukan Kunjungan Kerja Reses di Banjarmasin, Sinergikan Pembangunan Hukum dan HAM di Kalimantan Selatan



Banjarmasin, Humas_Info — Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025 di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (19/06/2025). Kegiatan yang berlangsung di Galaxy Hotel ini dihadiri oleh jajaran kementerian/lembaga yang berada di bawah koordinasi Komisi XIII, termasuk Kementerian Hukum, Pemasarakatan, Imigrasi, dan Komnas HAM.

Kegiatan ini dibuka dengan sambutan dari Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Meidy Firmansyah, yang menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah. Ia juga berharap kunjungan ini akan mendorong lahirnya dukungan kebijakan afirmatif bagi penguatan kelembagaan dan pelayanan publik di wilayah Kalimantan Selatan.

Dalam sambutan sekaligus membuka rapat, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan meninjau langsung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum, HAM, pamasarakatan, dan keimigrasian di daerah. Komisi XIII berharap forum ini dapat menjadi ruang tukar informasi, identifikasi permasalahan, serta penyampaian masukan yang konstruktif untuk dibawa ke rapat-rapat di tingkat pusat.

bol kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif dan akuntabel

Rapat diisi dengan paparan dari para pimpinan wilayah, termasuk Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasarakatan, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi, Kepala Kantor Wilayah HAM, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan. Pemaparan disusul dengan sesi pendalaman dan tanya jawab bersama seluruh anggota Komisi XIII DPR RI yang hadir.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh pejabat tinggi dari Kementerian Hukum RI dan Komnas HAM, antara lain Ketua Komnas HAM Anis Hidayah, Staf Ahli Menteri Hukum Bidang Ekonomi Wisnu Nugroho Dewanto, dan Staf Khusus Menteri HAM Stanislaus Wenna, serta pejabat pusat lainnya. Dari pihak DPR RI, hadir sejumlah anggota Komisi XIII, di antaranya H. Sugiati Santoso, Vita Ervina, Rapidin Simbolon, Muhammad Rofiqi, H. Anwar Sadad, Maruli Siahaan, M. Shadiq Pasadigoe, Al Muzzammil Yusuf, Pangeran Khairul Saleh, dan Teuku Ibrahim.

Dalam penutupan rapat, Komisi XIII DPR RI menyampaikan apresiasi atas berbagai inisiatif pelayanan publik yang dilakukan di Kalimantan Selatan serta mendorong penguatan kelembagaan, kebijakan, dan regulasi di sektor hukum dan HAM. Kegiatan ditutup dengan penyerahan cinderamata dan sesi foto bersama sebagai simbol kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam memperkuat tata kelola pemerintah yang responsif dan akuntabel.

Komisi XIII DPR RI Gelar RDP di Banjarmasin, Kemenkum Kalsel Paparkan Isu Strategis Hukum Di Wilayah



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 yang diselenggarakan pada Kamis (19/06/2025) di Galaxy Hotel Banjarmasin.

Kegiatan ini menjadi momen penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam bidang hukum, hak asasi manusia (HAM), pemasyarakatan, dan keimigrasian. Hadir dalam forum ini jajaran pejabat tinggi dari empat Kantor Wilayah vertikal Kementerian Hukum di Kalimantan Selatan, antara lain Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi, Kepala Kantor Wilayah HAM, dan Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Meidy Firmansyah.

Turut hadir pula pejabat tinggi Kemenkum tingkat pusat, seperti Staf Ahli Menteri Hukum Bidang Ekonomi Wisnu Nugroho Dewanto, Staf Khusus Menteri HAM Stanislaus Wenna, Kepala Biro Hukerma Ronald Lumbuun, Dir Tikers Ditjenpas Maulidi Hilal, Dir Patnal Ditjenim Barron Ichsan, serta Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Anton Edward Wardhana.

Kegiatan diawali dengan sambutan dari Plt. Kakanwil Kemenkum Kalsel yang menyampaikan apresiasi atas kehadiran Tim Komisi XIII DPR RI.

"Kunjungan ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat dukungan legislatif terhadap tugas-tugas Kemenkum di wilayah. Kami harapkan akan lahirnya kebijakan afirmatif dan peningkatan kapasitas kelembagaan untuk menjawab dinamika sosial yang semakin kompleks," ungkap Meidy.

Dalam sambutannya, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meninjau langsung situasi pembangunan hukum di Kalimantan Selatan serta menyerap berbagai masukan dari para pemangku kepentingan daerah. Ia berharap jajaran empat Kanwil dapat memberikan paparan menyeluruh untuk dibawa dalam rapat komisi mendatang.

RDP dilanjutkan dengan pemaparan dari masing-masing kepala kantor wilayah mengenai kondisi terkini serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di bidangnya masing-masing. Forum juga diwarnai sesi pendalaman dan tanya jawab antara anggota Komisi XIII DPR RI dan jajaran Kemenkum.

Adapun anggota DPR RI yang hadir dalam kunjungan ini antara lain H. Sugiat Santoso, Vita Ervina, Rapidin Simbolon, Muhammad Rofiqi, H. Anwar Sadad, Maruli Siahaan, M. Shadiq Pasadigoe, Al Muzzammil Yusuf, Pangeran Khairul Saleh, dan Teuku Ibrahim.

Dalam kesimpulan rapat, Komisi XIII DPR RI memberikan apresiasi atas berbagai inisiatif layanan publik yang telah dilakukan oleh para mitra kerja di Kalimantan Selatan. Komisi XIII mendorong adanya penguatan kebijakan, regulasi, dan kelembagaan demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan efisien.





Kanwil Kemenkum Kalsel Dorong Pelaku Kreatif Lindungi Karyanya Lewat Pensil Kreatif



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan berperan sebagai narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Pensil Kreatif (Perlindungan Hasil Kreativitas) yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Banjarmasin. Bertempat di Hotel Palm Banjarmasin, kegiatan ini diikuti oleh 60 pelaku pencipta karya kreatif, termasuk para konten kreator yang aktif di berbagai platform digital.

Kegiatan ini menjadi wadah edukatif untuk meningkatkan kesadaran pelaku industri kreatif terhadap pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang saat ini menjadi salah satu aspek krusial dalam menjaga orisinalitas dan keberlanjutan karya.

Hadir sebagai narasumber dari Kanwil Kemenkum Kalsel, yakni JF Penyuluh Hukum Pertama, Tulus Achir Cahyadi, yang memaparkan sejumlah poin penting, antara lain jenis-jenis HKI yang relevan dengan dunia kreatif seperti hak cipta, merek, dan desain industri.

Dalam pemaparannya, tim Kanwil menegaskan bahwa perlindungan HKI tidak hanya berfungsi sebagai tameng hukum, tetapi juga sebagai aset strategis yang dapat mendongkrak nilai ekonomi sebuah karya. Para peserta juga diberikan wawasan tentang cara mendaftarkan karya cipta, serta contoh kasus perlindungan karya digital yang banyak digunakan oleh kreator di media sosial.

Lebih lanjut, Kanwil Kemenkum Kalsel juga memperkenalkan peran fasilitatifnya dalam proses permohonan HKI, melalui layanan konsultasi, pendampingan, hingga sosialisasi lanjutan yang dapat diakses oleh pelaku kreatif secara gratis.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para pelaku kreatif di Banjarmasin semakin memahami pentingnya legalitas atas hasil karyanya, sekaligus terdorong untuk lebih aktif dalam melindungi dan memaksimalkan potensi ekonomi dari kreativitas yang dimiliki.



Staf Ahli Menteri Hukum Dampingi Komisi XIII DPR RI Tinjau Layanan Masyarakat dan Keimigrasian di Kalsel



Banjarbaru, Humas_Info – Staf Ahli Menteri Hukum Bidang Sosial dan Ekonomi, Wisnu Nugroho Dewanto bersama Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama, Ronald Lumbuun turut serta mendampingi Rombongan Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam rangka kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan, Rabu (18/6).

Kunjungan ini juga didampingi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan, Meidy Firmansyah serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana.

Mengawali rangkaian kegiatan, Komisi XIII DPR RI melaksanakan rapat dengar pendapat yang digelar di Galaxy Hotel Banjarmasin. Rapat diikuti jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Kementerian HAM, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Masyarakat, serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi.

Usai rapat, rombongan melanjutkan kegiatan dengan melakukan peninjauan langsung ke dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah Kalimantan Selatan, yakni Lembaga Masyarakat (Lapas) Kelas IIB Banjarbaru dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiati Santoso menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan untuk memastikan secara langsung kualitas layanan yang diberikan oleh UPT Kemenkum kepada masyarakat.

“Kami ingin melihat secara langsung bagaimana layanan yang diberikan kepada masyarakat di bidang masyarakat dan keimigrasian, sekaligus menyerap aspirasi dari jajaran di daerah,” ujar Sugiati.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan positif dari seluruh pihak yang terlibat.





Selamat Bertugas! Kemenkum Kalsel Hadiri Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru



Banjarbaru, Humas_Info – Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Riswandi, menghadiri pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru masa jabatan 2025–2030 yang diselenggarakan pada Sabtu, 21 Juni 2025, di Gedung Dr. K.H. Idham Chalid, Banjarbaru. Kegiatan dimulai pukul 11.30 WITA dan berlangsung dengan tertib dan lancar.

Acara pelantikan dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, yang secara resmi melantik Erna Lisa Halaby sebagai Wali Kota dan Wartono sebagai Wakil Wali Kota Banjarbaru. Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan tersebut dan berharap keduanya dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, menjadi pemimpin yang dipercaya rakyat, serta mampu membawa perubahan positif bagi Kota Banjarbaru. Gubernur juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang berpihak pada rakyat, terbuka terhadap kritik dan saran, serta melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan daerah.

Kegiatan pelantikan turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, unsur Forkopimda Provinsi dan Kota Banjarbaru, para Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Selatan, Kepala OPD Kota Banjarbaru, camat, lurah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), serta forum RT/RW se-Kota Banjarbaru.

Rangkaian kegiatan meliputi prosesi pelantikan, serah terima jabatan dari Penjabat Wali Kota kepada Wali Kota definitif, pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Banjarbaru, pemberian ucapan selamat dari para pejabat dan tamu undangan, sesi foto bersama, hingga konferensi pers dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang baru dilantik.

Risawandi, yang dalam hal ini mewakili Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, kepada tim Humas Kemenkum Kalsel turut mengucapkan selamat atas pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru terpilih. Kehadiran Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan dalam kegiatan ini merupakan wujud dukungan terhadap sinergi antar instansi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, serta penguatan peran aktif seluruh sektor dalam mendukung kemajuan daerah, khususnya di Kota Banjarbaru yang kini berkedudukan sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan.





**KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN**

bangga
melayani
bangsa



Terhubung lebih dekat:



[kemenkumkalsel](#)



[@kemenkumkalsel](#)



[kalsel.kemenkum.go.id](#)